



**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
( L K P j )  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
JALAN SOEKARNO NOMOR 54 KELURAHAN PAU  
TAHUN 2022**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat, dan BerkatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhirnya, semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ruteng, 6 Pebruari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI,

HERIBERTUS JELAMU, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19670316 199803 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1 - 6
BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN APBD .....	7 - 10
BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....	9- 26
III.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN.....	9
III.1.1. CAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA.....	9 -17
III.1.2. CAPAIAN KINERJA PRO:GRAM DAN KEGIATAN .....	18-24
III.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN .....	25
III.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	25
BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
DAN PENUGASAN .....	27
BAB V : PENUTUP .....	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020;
9. APBD Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

#### **1.2. Visi Misi**

### 1.3. Capaian indicator makro Kabupaten Manggarai

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara umum, ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur capaian kinerja makro yaitu: IPM (Index Pembangunan manusia), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan perkapita, dan ketimpangan Pendapatan.

Adapun perbandingan capaian Kinerja Makro kabupaten Manggarai tahun 2021 dan 2022 adalah seperti yang terdapat pada table 10 dibawah ini  
(sumber BPS Kabupaten Manggarai).

Tabel 1.3.1.

Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Manggarai tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,01	65,83	0,82
2	Angka Kemiskinan	71,03	69,68	1,35
3	Angka Pengangguran	3,70	3,50	0,20
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,79	-	
5	Pendapatan Perkapita	-2,08	-	
6	Ketimpangan Pendapatan	0,339	0,340	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua wilayah/ negara di seluruh dunia. Salah satu manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Adalah merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum(DAU)

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Manggarai tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,82 % , dari 65,01 tahun 2021 menjadi 65,83 tahun 2022.

**2. Angka kemiskinan**

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

Angka Kemiskinan Kabupaten Manggarai tahun 2022 berkurang sebesar 1,35ribu jiwa yaitu dari 71,03 ribu jiwa tahun 2021 berkurang menjadi 69,68 ribu jiwa pada tahun 2022.

**3. Angka Pengangguran**

Angka Pengangguran Kabupaten Manggarai tahun 2022 menurun sebesar 0,20 % yaitu dari 3,70% tahun 2021 menjadi 3,50% tahun 2022.

**4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 belum ada datanya

**5. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2022 juga belum ada datanya

**6. Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan Pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup serta pendapatan yang diterima atau yang dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Manggara tahun 2022 adalah 0,340 % sedangkan tahun 2021 sebesar 0,339% , dari angka ini selisihnya tdk terlalu jauh yaitu hanya sebesar 0,001%

**1.4 Gambaran Umum Daerah:**

- Data geografis wilayah;
- Jumlah Penduduk; (oleh Dinas Dukcapil)
- Pertumbuhan penduduk; (oleh Dinas Dukcapil)
- Jumlah PNS; (PNS Kabupaten oleh BKPSDM)

Pada tahun 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.4.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Tahun 2022

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-		1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Pejabat Fungsional			8		8
6.	Staf	-	6	5	-	11
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Tahun 2022

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	1	2	-	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		1	-	-	1
5.	Pejabat Fungsional	-	8	-	-	8
6.	Staf		4	3	4	11
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>24</b>

Tabel 1.4.3  
Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2022

NO.	NAMA PEGAWAI	Pendidikan	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	<b>HERIBERTUS JELAMU, SH</b>	S1	Pembina Tk. 1 IV/b	Kepala Dinas
2	<b>MARIA YASINTA ASO, SST</b>	S1	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris
3	<b>MATILDA HERLINA IRMA, A.Md</b>	S1	Pembina Tk. I,	Kabid TIK



			IV/b	
4	<b>METODIUS SANTOSA JEMAT, ST</b>	S1	Pembina IV/a	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik
5	<b>PASKALIS JEMALI</b>	S2	Pembina Tk.1	Kabid Persandian dan Statistik
6	<b>LUDOFIKUS LAMPUR</b>	D3	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	<b>VINSENSIA ARDIANA SUI, SE</b>	S1	Penata Muda Tk. I III/c	Perencana
8	<b>LATIF KAMARUDIN,SE</b>	S1	Penata Tk. I, III/d	Manggala Informatika
9	<b>MATEUS SALEMAN</b>	S1	Penata Tk. I, III/d	Manggala Informatika
10	<b>BLASIUS AMAN, SE</b>	S1	Penata, III/c	Manggala Informatika
11	<b>RUBENTUS JEHAMUR</b>	S1	Penata, III/c	Manggala Informatika
12	<b>CYPRIANUS EDUPATMAN, ST</b>	S1	Penata, III/c	Sandiman
13	<b>LAURENSIANA G.K. NUENG, A.Md</b>	D3	Penata Muda Tk. I III/b	Sandiman
14	<b>YOHANES BARUS</b>	SMA	Penata Tk. I, III/d	Manggala Informatika
15	<b>TADEUS TANGGANG , A.Md</b>	D3	Penata Muda, III/a	Fungsioanal umum
16	<b>AGUSTINUS N. DUDI, ST</b>	S1	Penata Muda, III/a	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan
17	<b>VALERIA VIANY, S.Si</b>	S1	Penata Muda, III/a	Sandiman Ahli Pratama
18	<b>DONATA AGNINOY JARUT, S.Kom</b>	S1	Penata, III/a	Operator Sandi dan Telekomunikasi
19	<b>PHILIPUS NANGA</b>	SLTA	Pengatur TK. I, II/d	Fungsional Umum
20	<b>PIUS JEHAUT</b>	SLTA	Pengatur, II/c	Fungsional Umum
21	<b>KRISTOFORUS HARNAS NOHOS, A.Ma</b>	D3	Pengatur, II/c	Fungsional Umum
22	<b>ELVIANA NURTI, A.Md</b>	D3	Pengatur, II/c	Operator Sandi dan Telekomunikasi
23	<b>SIPRIANUS HAMAN</b>	SLTA	Pengatur, II/c	Fungsional Umum
24	<b>ROFINA KIUL</b>	SLTA	Pengatur, II/c	Fungsional Umum

- Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan:

Tabel 1.4.4.

Tabel Realisasi Pendapatan

NO	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	470.000.000;	279.776.600;	59,53
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Terpisahkan (RSPD)	50,500,000;	19.105.000;	37,83
	Jumlah	520.500.000;	298.881.600;	57,42

- Realisasi belanja menurut jenis belanja;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.131.816.629,- realisasi sebesar Rp. 4.049.677.696,- atau sebesar 98,01 %.

Tabel 1.4.5

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3,796,954,105</b>	<b>3,724,635,948</b>	<b>98.10</b>
	Belanja Pegawai	1,960,657,329	1,903,484,708	97.08
	Belanja Barang dan Jasa	1,836,296,776	1,821,151,240	99.18
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>334,862,524</b>	<b>325,041,748</b>	<b>97.07</b>
	Belanja modal Peralatan dan Mesin	334,862,524	325,041,748	97.07
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4,131,816,629</b>	<b>4,049,677,896</b>	<b>98.01</b>

- Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan: **tidak ada.**

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.073.967.022,- Setelah perubahan anggaran menjadi Rp.4.131.816.629,- dengan 5 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.57.849.607,- Terdapat 1 kegiatan yang anggarannya bertambah yaitu **Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah**, dengan sub kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Perubahan Penjabaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun Anggaran 2022

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ( Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
		SEMULA	MENJADI	DPA 2022	DPPA 2022	
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,454,394,118	2,542,193,725	87,799,607
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,004,000	2,004,000	-
		- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	1,000,000	-
		Kooordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kooordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,004,000	1,004,000	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,867,312,722	1,960,368,329	93,055,607
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,827,891,722	1,917,907,329	90,015,607
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	38,400,000	41,400,000	3,000,000

		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1,021,000	1,061,000	40,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,000,000	11,000,000	-
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	11,000,000	11,000,000	-
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah	223,193,000	245,437,000	22,244,000
		Penyediaan Komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen instalasi listrik	8,047,500	9,580,500	1,533,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48,849,500	48,920,500	71,000
		Penyediaan bahan logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik Kantor	39,600,000	40,440,000	840,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,100,000	16,300,000	200,000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6,720,000	3,360,000	3,360,000
		Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	8,736,000	8,736,000	-
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	95,140,000	118,100,000	22,960,000
		Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
		Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	-	-	-
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	324,554,396	267,054,396	57,500,000
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	7,500,000	2,500,000
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	319,554,396	259,554,396	60,000,000
		Pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	26,330,000	56,330,000	30,000,000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	17,000,000	17,000,000	-
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9,330,000	9,330,000	-
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan lainnya	-	30,000,000	30,000,000

		<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	701,063,404	683,003,404	18,060,000
		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	701,063,404	683,003,404	18,060,000
		Monitoring opini dan aspirasi publik	Monitoring opini dan aspirasi publik	77,040,000	103,580,000	26,540,000
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	58,480,000	58,880,000	400,000
		Pengelolaan media komunikasi publik	Pengelolaan media komunikasi publik	477,364,604	432,364,604	45,000,000
		Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	37,860,000	37,860,000	-
		Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	50,318,800	50,318,800	-
		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	74,477,450	744,824,500	670,347,050
		PENGLOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGLOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,457,000	18,777,000	3,680,000
		Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	22,457,000	18,777,000	3,680,000
		PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	722,317,500	726,047,500	3,730,000
		Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	302,007,000	302,007,000	-
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	124,650,000	78,940,000	45,710,000
		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	56,180,500	56,180,500	-

		Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas	131,500,000	180,940,000	49,440,000
		Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	58,500,000	58,500,000	-
		monitoring evaluasi pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	monitoring evaluasi pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	49,480,000	49,480,000	-
<b>2</b>	<b>URUSAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK</b>	-	78,115,000	78,115,000
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	70,515,000	78,115,000	7,600,000
		Penyelenggaraan statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral	70,515,000	78,115,000	7,600,000
		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	70,515,000	78,115,000	7,600,000
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		-	-
<b>3</b>	<b>URUSAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN</b>	103,220,000	83,680,000	19,540,000
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	103,220,000	83,680,000	19,540,000
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	103,220,000	83,680,000	19,540,000
		Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	103,220,000	83,680,000	19,540,000
		<b>Total Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>Total Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>4,073,967,022</b>	<b>4,131,816,629</b>	57,849,607

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**3.1.1 Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja**

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN 1V		Ket
			RENSTRA	REALISASI	%	
1	2	3	4	6	7	12
1.	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	1. Indeks SPBE	2.10	1.76	84	
		2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00	7	175	
		3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	20.00	5	15	
	Rata-rata Sasaran Strategis 1				91	
2.	Meningkatnya akses informasi publik	1. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	75.00	8	89	

		2.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	100.00	6	120	
		3.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00	7	16	
	Rata-rata Sasaran Strategis 2					75	
3.	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	100.00	43	100	
		2.	Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	100.00	0	0	
		3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00	43	100	
		4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00	43	100	
	Rata-rata Sasaran Strategis 3					75	
<b>Rata-rata Sasaran 1 s.d 3</b>						80	

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

#### 1. Indeks SPBE

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat atau level tingkat kematangan predikat indeks SPBE:

4,2 – 5,0 = Memuaskan

3,4 – <4,2 = Sangat Baik

2,6 – <3,5 = Baik

1,8 – <2,6 = Cukup

<1,8 = Kurang

Target Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah 2,10 % sedangkan realisasi pada tahun 2022 hanya sebesar 1,76 % dengan Kategori KURANG. Dari target dan realisasi yang dicapai, jika dipersensitaskan mencapai 84 %. Walaupun tidak mencapai target tapi capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2021 yang realisasinya sebesar 1,55.

Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan SPBE di kabupaten Manggarai masih berada pada kategori KURANG. Hal ini dapat dijelaskan untuk tahun 2022, beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan yakni: Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung, yang ada hanya penilaian mandiri, penilaian dokumen dan itu artinya bahwa penilaian hanya dilakukan terhadap dokumen yang diupload di dalam aplikasi tanpa meminta penjelasan atau verifikasi dokumen yang diupload.

Realisasi Indeks SPBE dari tahun 2020 s/d 2022:

Tahun	Indeks	Kategori	Bertambah/Berkurang
2020	1,91	CUKUP	-
2021	1,55	KURANG	Berkurang 0,36

2022	1,76	KURANG	Bertambah 0,21
------	------	--------	----------------

1. Factor pendukung :

Walau masih berada pada kategori KURANG, namun terdapat peningkatan nilai sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya yang mencapai indeks 1,55 dengan kategori yang sama. Peningkatan ini disebabkan karena Kabupaten Manggarai sudah menerapkan beberapa aplikasi umum dalam memberikan pelayanan kepada public. Misalnya Aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Kab. Manggarai, yang menggunakan aplikasi SILPPD dan OMSPAN, serta Layanan Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan E-SAKIP Reviu milik Kemenpan-RB.

2. Factor penghambat:

Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan SPBE di kabupaten Manggarai masih berada pada kategori KURANG. Hal ini dapat dijelaskan sbb:

- a. untuk tahun 2022, beberapa tahapan kegiatan tidak dilaksanakan yakni: Penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung , yang ada hanya penilaian mandiri, penilaian dokumen dan itu artinya bahwa penilaian hanya dilakukan terhadap dokumen yang diupload di dalam aplikasi tanpa meminta penjelasan atau verifikasi dokumen yang diupload
- b. Kebijakan terkait penerapan SPBE di Kabupaten Manggarai belum memadai untuk memenuhi standar kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Kepmenpan 962 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

3. Solusi:

Dari kondisi poin 2 di atas, langkah-langkah yang sudah ditempuh:

- a. Melakukan rapat dengan evaluator SPBE Kementrian PAN-RB untuk meminta penjelasan rinci terkait Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022 melalui surat no. 44/Diskominfo/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Mohon Penjelasan. Rapat secara daring sudah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Februari 2023 yang diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo beserta staf yang menangani SPBE. Rapat ini sangat penting untuk melihat kekurangan pada saat evaluasi SPBE tahun 2022 dan melakukan perbaikan untuk tahun 2023.
- b. Mengajukan usulan perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup 47 Tahun 2022.
- c. Mengajukan usulan penetapan Perbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai dan sudah diregistrasi di Bagian Hukum dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Manggarai.
- d. Terus berproses, terus bergerak untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Manggarai

## **2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**

Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum.

Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa.

Capaian kinerja kelembagaan pemerintah dapat dilihat dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik tidak terlepas dari berbagai bentuk inovasi dan Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)

Kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sesuai dengan perkembangan teknologi , informasi dan Komunikasi dapat dilihat dari Skor Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terus meningkat.

Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 %, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 175%; capaian ini melampaui target yang ditetapkan, karena jumlah Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2022 terdata ada 7 Layanan yaitu PPID,SP4N Lapor, SIPD,SIRUP,SPSE,SIMDA,JDIHN; dari target 4 layanan yaitu SP4N Lapor,PPID, SPSE,JDIHN;

## **3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi;**

Layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi adalah suatu sistim layanan adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain juga merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara

sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu, misalnya data dari satu bagian dibawa kebagian lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jadi kalau secara manual maka derajat integrasinya menjadi tinggi.

Pada tahun 2022 Dinas komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indikator ini sebesar 20 %, sedangkan realisasinya sebesar 3,05% atau dalam persentase capaiannya sebesar 15 %, capaian ini belum mencapai target karena dari 164 layanan administrasi pemerintahan yang ada di kabupaten manggarai yang menyebar di semua Perangkat Daerah hanya ada 5 layanan yang sudah terintegrasi yaitu SIPD, SIMDA, PPID, JDIHN, SPSE; dengan perhitungan yaitu 20 % dari 164 sama dengan 32,8 yang artinya diharapkan pada tahun 2022 ada 32 atau 33 layanan administrasi Pemerintahan yang sudah terintegrasi, akan tetapi berdasarkan data hanya ada 5 layanan yang sudah terintegrasi sehingga 5 dibagi 32,8 dikali 20 % sama dengan 3,03 %, maka dalam persentase capaian indikator ini sebesar 3,03 % dibagi 20 % di kali 100% sama dengan 15 %

**4. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah.**

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indikator ini adalah sebesar 75%, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 66,67 %, jika dipersentasikan mencapai 89 % , capaian ini sudah melampaui target yang sudah ditetapkan , dengan perhitungan 66,67 % dibagi 75 % sama dengan 89 % ; Dari capaian ini dapat Kami gambarkan bahwa sampai dengan tahun 2022 sudah ada delapan (8) Kelompok Informasi masyarakat yang sudah di bentuk dari target 12 Kelompok yang harus dibentuk.

**5. Persentase diseminasi dan layanan informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM).**

Pada tahun 2022 dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian indikator ini adalah 100 % dan realisasinya mencapai 120 % , yaitu Dari target 5 (Website, LPPL RSPD, Antara Digital Media, PPID, SP4N Lapor) Diseminasi dan layanan informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi terdapat 6 layanan pada tahun 2022 yaitu Website, LPPL RSPD, Antara Digital Media, PPID, SP4N Lapor dan ditambah Media Sosial ; dengan perhitungan enam (6) dibagi lima (5) dikali seratus persen (100%) sama dengan seratus dua puluh persen (120%) .

**6. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo .**

Target capaian indicator ini pada tahun 2022 adalah 100 % dalam arti semua Perangkat daerah (43 PD) sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo akan tetapi realisasi pada tahun 2022 hanya ada 7 Perangkat Daerah yaitu PPO, Dinkes, Kec. Satarmese, Kec. Satarmese Barat, Setwan, Pariwisata, Kec. Reok; sehingga capaian kinerja indicator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 16 % dengan perhitungan Tujuh (7) dibagi Empat Puluh Tiga (43) dikali Seratus persen (100 %) sama dengan Enam Belas Persen (16 %)

**7. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi.**

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian indicator ini pada tahun 2022 adalah 100 % sedangkan realisasinya mencapai 100% dalam arti semua Perangkat Daerah sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi , hal ini dilihat dari semua Perangkat Daerah sudah memiliki Mail Manggarai.go.id.

**8. Persentase sistem data statistik yang terintegrasi;**

Target Capaian dari indicator ini pada tahun 2022 adalah 100% akan tetapi realisasinya masih nol karena system data statistic yang ada di kabupaten manggarai belum terintegrasi dengan aplikasi yang lain yang ada di setiap Perangkat daerah, Diharapkan kedepannya sudah bisa terintegrasi , mohon dukungan dari kita semua agar kedepannya indicator ini bias terealisasi.

**9. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;**

Pada tahun 2022 ditetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 % dan realisasi nya mencapai 100 % dengan penjelasan bahwa semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai dalam Angka kesemua perangkat daerah, dengan demikian diharapkan semua PD menggunakan data statistic yang dalam buku tersebut.

**10. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;**

Pada tahun 2022 ditetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 % dan realisasi nya mencapai 100 % dengan penjelasan bahwa semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai dalam Angka kesemua perangkat

daerah, dengan demikian diharapkan semua PD menggunakan data statistic yang dalam buku tersebut.

Untuk mencapai target indicator dari sepuluh (10) IKK yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kami dengan sangat rendah hati mengharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah untuk mendukung Kami dari segi SDM dan Infra struktur untuk mencapai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan demikian dapat meningkatkan nilai indeks SPBE Kabupaten Manggarai yang juga menjadi IKU Pemerintah kabupaten Manggarai.

➤ Permasalahan :

1. Sangat Kurangnya SDM ;
2. Kurangnya sarana dan prasarana;
3. Kurangnya anggaran.

➤ Solusi

4. Penambahan SDM;
5. Pengadaan sarana dan prasarana;
6. Penambahan anggaran.

### **3.1.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.4.131.816.629,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.049.677.696,- dengan tingkat capaian sebesar 98,01 %, realisasi fisik 100 %.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	MENGATASI MASALAH
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,542,193,725	2,475,652,227	97.38		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2,004,000	2,004,000	100.00		
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00		
	- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3 dokumen	150.00	1,004,000	1,004,000	100.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,960,368,329	1,903,195,708	97.08		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org	24 org	109.09	1,917,907,329	1,861,234,708	97.05		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya honorarium pengelola APBD	7 Org	7 Org	100.00	41,400,000	40,900,000	98.79		
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	1,061,000	1,061,000	100.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					11,000,000	10,123,000	92.03		
	- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai	Tersediannya mesin kartu absensi	1 Unit	1 Unit	100.00	11,000,000	10,123,000	92.03		
	Administrasi umum Perangkat Daerah					245,437,000	242,896,783	98.97		

		Penyediaan Komponen instalasi listrik	Tersediannya Komponen instalasi listrik	9 jenis	9 jenis	100.00	9,580,500	9,580,500	100.00		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Alat tulis kantor	56 Jenis	56 Jenis	100.00	48,920,500	48,920,500	100.00		
		Penyediaan bahan logistik Kantor	Tersediannya makan dan minum rapat	29 Org	29 Org	100.00	40,440,000	40,440,000	100.00		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70 Buku	70 Buku	100.00	16,300,000	16,300,000	100.00		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 Media	2 Media	100.00	3,360,000	3,360,000	100.00		
		Penyediaan bahan/material	Tersediannya bahan/material	30 jns	30 jns	100.00	8,736,000	8,736,000	100.00		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali	100.00	118,100,000	115,559,783	97.85		
		Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	-		
		Pengadaan mebel	Pengadaan mebel				-	-	-		
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					267,054,396	263,529,236	98.68		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya meterai	728 lbr	728 lbr	100.00	7,500,000	6,137,300	81.83		
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening internet air dan listrik	3 jns	3 jns	100.00	259,554,396	257,391,936	99.17	194.86	
		Pemeliharaan barang milik daerah					56,330,000	53,903,500	95.69		



		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	3 unit	100.00	17,000,000	14,574,500	85.73		
		- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	17 unit	17 unit	100.00	9,330,000	9,330,000	100.00		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantoran Bangunan lainnya	1 Paket	1 Paket	100.00	30,000,000	29,999,000	100.00		
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>							683,003,404	677,900,980	99.25		
		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten					683,003,404	677,900,980	99.25		
		- Monitoring opini dan aspirasi publik	Tersedianya data jangkauan siaran LPPL RSPD, Blank spot area, dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	103,580,000	100,761,300	97.28		
		- Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Tersedianya data dan informasi untuk konten PPID, Website, i-media, o-media	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00	58,880,000	58,700,000	99.69		
		- Pengelolaan media komunikasi publik	Tersediannya SDM dan terpeliharanya alat kantor	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	432,364,604	430,914,680	99.66		
		- Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	37,860,000	37,720,000	99.63		
		- Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Terselenggaranya kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat media dan kemitraan komunitas	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	50,318,800	49,805,000	98.98		

		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>					744,824,000	735,012,689	98.68		
		PENGLOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					18,777,000	18,527,000	98.67		
		Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	18,777,000	18,527,000	98.67		
		PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					726,047,000	716,485,689	98.68		
		Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Terlaksananya pembuatan master plan E-Government Pemerintah kabupaten manggarai	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00	302,007,000	301,587,000	99.86		
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Tersediannya Pusat Data Pemerintah Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00	78,940,000	76,425,986	96.82		
		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Tersediannya aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00	56,180,000	55,653,024	99.06		
		Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas	Terlaksananya pengelolaan Smart city pemerintah kabupaten manggarai	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	180,940,000	177,162,048	97.91		

		Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Tersedianya Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	58,500,000	57,407,631	98.13		
		monitoring evaluasi pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Terlaksananya penilaian SPBE kabupaten manggarai	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	49,480,000	48,250,000	97.51		
URUSAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK						78,115,000	77,875,000	99.69		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						78,115,000	77,875,000	99.69		
	Penyelenggaraan statistik sektoral						78,115,000	77,875,000	99.69		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan ,pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Diseminasi data statistic sektoral	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	78,115,000	77,875,000	99.69		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi					-	-	-		
URUSAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN						83,680,000	83,236,800	99.47		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						83,680,000	83,236,800	99.47		
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota						83,680,000	83,236,800	99.47		

		<b>Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan - sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00	83,680,000	83,236,800	99.47		
		<b>Total Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>					<b>4,131,816,129</b>	<b>4,049,677,696</b>	<b>98.01</b>		

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Pada tahun 2022, tidak ada kebijakan strategis Pemerintah yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.3

Kebijakan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Tidak ada	-	-
2	-		

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Pengelolaan Situs Pemda agar kontennya selalu di update
2. Dibangun spot- spot wifi gratis sebanyak mungkin untuk mensupport masyarakat dalam mendapatkan informasi yang banyak dan meluas.

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MANGGARAI  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI MANGGARAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

N o	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4

1.	1.Pengelolaan Situs Pemda agar kontennya selalu di update	- PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan 'Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, dengan total anggaran Rp. 58.880.000;	- Diskominfo selalu mengupdate data pada website Pemda dan Tahun 2022 sudah ditambah dengan Media Sosial Diskominfo telah melakukan penyebarluasan informasi yaitu IG Dinas Kominfo, FB ,youtube
2	2.Dibangun spot- spot wifi gratis sebanyak mungkin untuk mensupport masyarakat dalam mendapatkan informasi yang banyak dan meluas.	- PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan 'Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten, dengan total anggaran Rp. 103.580.000;	Penyediaan tdk secara langsung oleh Dinas Kominfo tetapi melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo dlm hal ini melalui Badan Aksesibilitas telekomunikasi Indonesia yg sampai dengan tahun 2022 jml nya sudah mencapai 51 titik yg menyebar di fasilitas kesehatan,pendidikan,ktr pemerintahan dan fasilitas publik lainnya

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA**

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

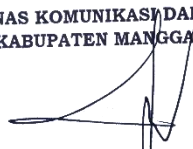
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan cukup optimal .akan tetapi di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang

Demikian penyampaian LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Ruteng, 6 Pebruari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI,  
  
HERIBERTUS JELAMU, SH  
PEMBINA  
NIP. 19670316 199803 1 005